KONSEP KEADILAN SOSIAL DALAM PANCASILA : IMPLEMENTASINYA DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT

Fariz Aditya *¹

¹ Universitas Negeri Medan

*e-mail : farizaditya11@gmail.com

Abstrak

Konsep keadilan sosial merupakan salah satu nilai yang dijunjung tinggi dalam Pancasila. Keadilan sosial merupakan konsep yang luas dan terbuka untuk interpretasi yang beragam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep keadilan sosial dalam Pancasila diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur. Pendekatan yang diadopsi adalah memfasilitasi pencarian informasi yang relevan dengan membaca dan menelaah berbagai sumber literatur. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Keadilan sosial, sebagai salah satu konsep inti dalam Pancasila, memberikan arahan penting bagi kehidupan masyarakat di Indonesia. Dalam praktiknya, implementasi konsep ini tercermin dalam berbagai kebijakan pemerintah, seperti pemerataan akses pendidikan, perlindungan sosial, dan partisipasi dalam kehidupan politik. Namun, upaya tersebut masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, seperti ketimpangan ekonomi antarwilayah dan kualitas layanan publik yang belum merata. Diperlukan tindakan progresif untuk mengatasi tantangan tersebut.

Kata Kunci : Keadilan sosial, Pancasila

Abstract

The concept of social justice is one of the values upheld in Pancasila. Social justice is a broad concept and open to diverse interpretations. This research aims to find out how the concept of social justice in Pancasila is implemented in social life in Indonesia. This research uses the literature study method. The approach adopted is to facilitate the search for relevant information by reading and reviewing various literary sources. The results of the research show that social justice, as one of the core concepts in Pancasila, provides important direction for people's lives in Indonesia. In practice, the implementation of this concept is reflected in various government policies, such as equal access to education, social protection and participation in political life. However, these efforts are still faced with a number of challenges, such as economic inequality between regions and the uneven quality of public services. Progressive action is needed to overcome these challenges.

Keywords : Social justice, Pancasila

PENDAHULUAN

Sebagai dasar negara Indonesia, Pancasila memiliki peran penting dalam membentuk identitas, nilai, dan arah kebijakan negara. Konsep keadilan sosial merupakan salah satu nilai yang dijunjung tinggi dalam Pancasila. Keadilan sosial merupakan konsep yang luas dan terbuka untuk interpretasi yang beragam. Bagaimana masyarakat mengartikan dan menerapkan konsep keadilan sosial dalam kehidupan sehari-hari dapat menjadi subjek perdebatan dan penelitian yang menarik. Meskipun keadilan sosial diakui sebagai bagian integral dari Pancasila, implementasinya dalam kehidupan bermasyarakat seringkali menghadapi tantangan yang kompleks. Faktor-faktor seperti ketimpangan ekonomi, akses terhadap layanan publik, perlakuan yang adil di mata hukum, dan kesetaraan dalam kesempatan dapat menjadi hambatan dalam mencapai keadilan sosial yang sesuai dengan prinsip Pancasila. Realitas sosial di berbagai daerah di Indonesia mungkin berbeda-beda, yang dapat memengaruhi implementasi konsep keadilan sosial. Faktor geografis, budaya, dan ekonomi dapat mempengaruhi cara masyarakat mengalami dan merespons konsep keadilan sosial.

Dalam sila kedua dan sila kelima Pancasila, tertuang nilai-nilai tujuan Negara untuk menciptakan keadilan dalam konteks kehidupan bersama. Makna dari sila kedua dan sila kelima mengandung makna keadilan yang berupa nilai, tentunya harus diwujudkan dalam kehidupan bersama. Keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakekat keadilan sosial yaitu keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan sesama, hubungan

manusia dengan bangsa dan negaranya kemudian yang terakhir adalah hubungan manusia dengan Tuhannya. Walaupun banyak pendapat yang memberikan persepsi yang sama antara keadilan sosial dan Marxisme, akan tetapi sesuai dengan fleksibilitas Pancasila, ideologi ini sudah tidak dapat diaktualisasikan pada era reformasi seperti sekarang ini. Keadilan sosial pada era reformasi merupakan keadilan bagi masyarakat karena sosial bukan merupakan ideologi Marxisme. Sosial merupakan hal yang berkaitan dengan masyarakat bukan merupakan ideologi Marxisme seperti yang diagung-agungkan oleh komunis (Febriansyah : 2017).

Rumusan Masalah

Bagaimana konsep keadilan sosial dalam Pancasila diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia, serta faktor-faktor apa saja yang memengaruhi implementasinya?

Landasan Teori

1. Teori Keadilan Sosial

Menurut John Rawls, keadilan merupakan *fairness (justice as fairness)*. Keadilan adalah adil dalam hasilnya karena berasal dari pilihan. Ini berakar pada keyakinan Rawls bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, manusia tidak mengetahui posisi mereka, tujuan dan rencana hidup mereka, dan bahwa mereka tidak menyadari apakah mereka generasi berikutnya atau bagian dari masyarakat. Individu dalam masyarakat dianggap sebagai entitas yang tidak jelas (Rawls : 1971). Keadilan menurut Thomas Hobbes, terjadi ketika tindakan dipandang adil karena didasarkan pada perjanjian yang telah disetujui. Dari pernyataan ini, dapat disimpulkan bahwa keadilan hanya dapat tercapai ketika dua pihak telah sepakat melalui kesepakatan.

Salah satu kontribusi penting dalam pemikiran tentang keadilan sosial berasal dari Amartya Sen, yang mengusulkan pendekatan yang lebih inklusif dalam "The Idea of Justice" (2009). Sen menekankan pentingnya memperhatikan keragaman kebutuhan dan kapabilitas individu dalam mencapai keadilan sosial, mengkritik pendekatan yang terlalu terfokus pada distribusi sumber daya material semata. Menurutnya, keadilan sosial harus dipahami sebagai upaya untuk memperbaiki ketidaksetaraan dalam kapabilitas individu untuk hidup yang bermakna dan memuaskan. Dalam konteks ini, Sen menawarkan pendekatan yang lebih holistik dan kontekstual, yang mempertimbangkan aspek-aspek seperti kesehatan, pendidikan, kebebasan politik, dan partisipasi dalam masyarakat. Pemikiran Sen mengilhami banyak penelitian dan kebijakan publik yang berorientasi pada pencapaian keadilan sosial yang lebih menyeluruh dan inklusif.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur. Pendekatan yang diadopsi adalah memfasilitasi pencarian informasi yang relevan dengan membaca dan menelaah berbagai sumber literatur yang terkait dengan topik penelitian. Dengan menggunakan metode ini, peneliti dapat mengeksplorasi secara mendalam dalam melakukan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep keadilan sosial dalam Pancasila menjadi pedoman bagi kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Sebagai salah satu sila yang tercantum dalam Pancasila, keadilan sosial menekankan perlunya pemerataan sumber daya dan kesempatan bagi seluruh rakyat. Hal ini mencakup aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan partisipasi dalam kehidupan politik. Dalam praktiknya, implementasi konsep keadilan sosial dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia tercermin dalam berbagai kebijakan dan program pemerintah. Pendidikan merata dan berkualitas menjadi fokus utama dalam upaya mewujudkan keadilan sosial. Pemerintah berupaya memastikan akses pendidikan yang sama bagi semua warga negara, dengan membangun infrastruktur pendidikan di seluruh pelosok negeri dan memberikan bantuan kepada keluarga kurang mampu. Program beasiswa, seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Cerdas (KIC), serta bantuan langsung tunai untuk biaya pendidikan, adalah contoh nyata dari upaya pemerintah dalam mendorong partisipasi dan akses pendidikan yang lebih luas.

Selain itu, untuk mengatasi disparitas ekonomi antarwilayah dan antarkelompok masyarakat, pemerintah juga mengambil langkah-langkah untuk mendorong pemerataan ekonomi. Program-program pemberdayaan ekonomi di daerah-daerah terpencil, bantuan modal usaha bagi kelompok masyarakat kecil, dan investasi dalam pembangunan infrastruktur ekonomi lokal adalah beberapa contoh upaya dalam mewujudkan keadilan sosial dalam ranah ekonomi. Perlindungan sosial dan kesehatan universal juga menjadi bagian integral dari konsep keadilan sosial dalam Pancasila. Program-program jaminan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako, bertujuan untuk memberikan bantuan langsung kepada keluarga miskin dan rentan. Selain itu, dengan diberlakukannya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), setiap warga negara dijamin akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas tanpa memandang status sosial atau ekonomi.

Selain dari sisi pemerintah, masyarakat juga memiliki peran penting dalam menciptakan keadilan sosial. Partisipasi aktif dalam proses demokrasi, seperti pemilihan umum dan mekanisme konsultasi publik, adalah salah satu cara bagi warga negara untuk berkontribusi dalam pembentukan kebijakan yang berpihak pada kepentingan bersama. Selain itu, sikap gotong royong dan solidaritas sosial dalam membantu sesama yang membutuhkan juga merupakan bagian dari praktik keadilan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun telah ada upaya-upaya yang dilakukan untuk mewujudkan konsep keadilan sosial dalam Pancasila, namun masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah ketimpangan ekonomi yang masih cukup besar antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok masyarakat yang berbeda. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan kebijakan yang lebih progresif dalam pemerataan pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan, serta peningkatan akses terhadap lapangan kerja dan pelatihan keterampilan bagi masyarakat.

Selain itu, kualitas layanan publik yang belum merata juga menjadi tantangan dalam mewujudkan keadilan sosial. Terdapat disparitas dalam akses dan mutu layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur antarwilayah, yang memengaruhi kesetaraan dalam mendapatkan manfaat dari layanan-layanan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperbaiki kualitas layanan publik di seluruh pelosok negeri, serta memastikan bahwa layanan-layanan tersebut benar-benar memberikan manfaat yang sama bagi semua warga negara. Kesadaran dan pendidikan masyarakat tentang nilai-nilai keadilan sosial dan Pancasila juga perlu ditingkatkan. Pendidikan moral dan kewarganegaraan yang mengedepankan nilai-nilai keadilan sosial dapat membantu membangun kesadaran dan komitmen bersama untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan. Selain itu, upaya sosialisasi dan advokasi oleh berbagai lembaga masyarakat sipil dan media massa juga dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Dengan memperkuat implementasi konsep keadilan sosial dalam Pancasila dan mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi, Indonesia dapat melangkah menuju masyarakat yang lebih inklusif, adil, dan berkeadilan sesuai dengan cita-cita bangsa. Dengan menjaga komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila dan semangat gotong royong, kita dapat bersama-sama membangun masa depan yang lebih cerah bagi generasi mendatang.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Sila Kelima Pancasila

Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kompleks dan beragam. Faktor-faktor tersebut mencakup institusi, kepemimpinan, psikologi sosial, struktur masyarakat, dan komunikasi. Dalam praktiknya, upaya untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila sering kali dihadapi oleh tantangan yang memerlukan pemahaman mendalam dan strategi yang tepat guna mencapai kesuksesan dalam mewujudkan falsafah hidup bangsa Indonesia tersebut. Institusi seperti pemerintah, lembaga pendidikan, media massa, dan organisasi masyarakat sipil memiliki peran krusial dalam membentuk dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Kebijakan publik, regulasi, dan budaya organisasi yang diterapkan oleh institusi-institusi tersebut akan memengaruhi sejauh mana nilai-nilai Pancasila dapat dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, pemerintah melalui kebijakan pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan,

serta lembaga pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam kurikulumnya. Kepemimpinan yang mengedepankan nilai-nilai Pancasila dapat memberikan dampak yang signifikan dalam menggerakkan masyarakat menuju implementasi yang lebih baik. Pemimpin yang konsisten dalam mendemonstrasikan integritas, keadilan, dan semangat kerakyatan akan memotivasi dan mengilhami masyarakat untuk mengikuti jejaknya. Contoh keberhasilan implementasi nilai-nilai Pancasila melalui kepemimpinan dapat dilihat dari praktik kepemimpinan yang bersifat partisipatif dan inklusif dalam berbagai tingkatan, baik di tingkat lokal maupun nasional. Komunikasi yang efektif tentang nilai-nilai Pancasila dapat membantu memperkuat kesadaran dan komitmen terhadap nilai-nilai tersebut. Media massa, pendidikan kewarganegaraan, dan kampanye sosial dapat menjadi sarana untuk menyebarkan pemahaman yang lebih baik tentang nilai-nilai Pancasila dan pentingnya mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, program-program pendidikan kewarganegaraan yang mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam kurikulumnya dapat membantu membentuk generasi yang lebih paham dan berkomitmen terhadap Pancasila. Dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi nilai-nilai Pancasila seperti yang telah dibahas di atas, kita dapat mengambil langkah-langkah yang lebih tepat guna dalam mewujudkan falsafah hidup bangsa Indonesia tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Penting untuk terus melakukan kajian dan evaluasi terhadap faktor-faktor tersebut agar upaya implementasi nilai-nilai Pancasila dapat menjadi lebih efektif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Keadilan sosial, sebagai salah satu konsep inti dalam Pancasila, memberikan arahan penting bagi kehidupan masyarakat di Indonesia. Dalam praktiknya, implementasi konsep ini tercermin dalam berbagai kebijakan pemerintah, seperti pemerataan akses pendidikan, perlindungan sosial, dan partisipasi dalam kehidupan politik. Namun, upaya tersebut masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, seperti ketimpangan ekonomi antarwilayah dan kualitas layanan publik yang belum merata. Diperlukan tindakan progresif untuk mengatasi tantangan tersebut, termasuk peningkatan kualitas layanan publik, pemerataan pembangunan ekonomi, dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai keadilan sosial dan Pancasila. Dengan memperkuat implementasi konsep keadilan sosial dan menjaga komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila, Indonesia dapat menuju arah masyarakat yang lebih inklusif, adil, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk institusi, kepemimpinan, psikologi sosial, struktur masyarakat, dan komunikasi. Institusi seperti pemerintah, lembaga pendidikan, dan media massa memiliki peran penting dalam membentuk dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Kepemimpinan yang mengedepankan integritas dan keadilan juga memainkan peran krusial dalam menggerakkan masyarakat. Komunikasi yang efektif tentang nilai-nilai Pancasila melalui media massa dan pendidikan kewarganegaraan dapat memperkuat kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai tersebut. Upaya terus-menerus dalam kajian dan evaluasi diperlukan agar implementasi nilai-nilai Pancasila dapat menjadi lebih efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiman, A. (2018). Pancasila sebagai Ideologi Negara. Kencana Prenada Media Group.
- Febriansyah, F. I. (2017). Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(25), 1. doi:10.30996/dih.v13i25.1545
- Hasan, H. (2017). Pancasila dan Sistem Pemerintahan Indonesia. PT RajaGrafindo Persada.
- Rawls, J. (1971). *A theory of justice*. Cambridge (Mass.): Harvard University Press.
- Sen, A. (2009). *The Idea of Justice*. Harvard University Press.
- Soekanto, S., & Machmud, H. (2017). Pancasila dan Ketahanan Nasional. Prenada Media.
- Soesilo, D. (2005). Pancasila dalam Tatanan dan Gerak Masyarakat. PT Gramedia Pustaka Utama.